

Praktik Baik Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program PKH Setelah Exit Program Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Lasarus Jehamat^{1*} , Yosef Emanuel Jelahun¹  dan Christine Erika Meka¹ 

¹ Dosen Sosiologi Fisip Undana Kupang, NTT, Kemendikbud, Indonesia

* Korespondensi: lasarus.jehamat@staf.undana.ac.id Tel: 082237870890

Diterima: 28 September 2020; Disetujui: 26 Januari 2021; Diterbitkan: 25 April 2021

Abstract: Kajian ini berjudul Praktik Baik Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang). Kajian ini didasarkan pada data banyaknya dana PKH yang tidak digunakan dengan baik di beberapa daerah termasuk di NTT. Namun, Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Desa Oesena dan Nonbes memperlihatkan praktik baik dari dana PKH. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi usaha yang dikembangkan KPM Program PKH pasca-exit program PKH dan strategi usaha penerima dana PKH pasca-exit program dalam meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan subjek penelitian sebanyak 12 orang. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara sampel bertujuan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, FGD, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik Pelaksanaan program dana PKH di desa Oesena dan kelurahan Nonbes sangat baik dalam mengembangkan dana PKH. Dana yang diterima KPM dipakai untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah dan ibu hamil (30%), ditabung (20) dan untuk mengembangkan usaha rumah tangga (50%). Anggota KPM memiliki jiwa inovatif, kreatif, dan produktif dalam mengelola dana bantuan PKH. Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH di desa Oesena dan kelurahan Nonbes memiliki strategi untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan membuat rencana anggaran individu, merintis usaha kecil-kecilan, memasarkan produk-produk dari modal dan PKH.

Kata kunci: Praktik Baik, Program Keluarga Harapan, Exit-Program, Kesejahteraan Sosial

Abstract: *The study was entitled Good Practices for the Implementation of the Harapan Family Program (Case Study in Oesena Village and Nonbes Village, Amarasi District, Kupang Regency). This study is based on data on the amount of PKH funds that were not used properly in several regions, including NTT. However, the Beneficiary Groups (KPM) in Oesena and Nonbes Villages demonstrated good practice of PKH funds. This study aims to see and identify the efforts developed by the KPM PKH Program post-exit PKH Program and the business strategies of post-exit PKH fund recipients in improving welfare. This study uses qualitative techniques with 12 research subjects. Sampling is done by purposes sampling. Data collection was carried out by means of observation, FGD, and in-depth interviews. The results showed that the PKH funding program in Oesena and Nonbes villages was very good in developing PKH funds. Funds received by KPM are used to meet the needs of schools and pregnant women (30%), savings (20) and to develop household businesses (50%). KPM members have an innovative, creative, and productive spirit in PKH assistance funds. PKH Beneficiary Groups (KPM) in Oesena Village and Nonbes Village have a strategy to improve welfare, namely by making individual budget plans, starting small businesses, marketing products from capital and PKH.*

Keywords: *Best Practice, Hope Family Program, Exit-Program, Social Welfare*

1. Pendahuluan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program unggulan kementerian sosial. Banyak riset membuktikan keberhasilan program ini. Data kualitatif menunjukkan PKH memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan suksesnya pelaksanaan program ini di beberapa tempat. Irmayani dan Nainggolan (2015) menyebutkan, perilaku *coping* penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjelang *exit program* di Jakarta Utara berhasil mengubah keadaan masyarakat. Dari aspek kemanfaatan, program kesejahteraan sosial anak dan program PKH lebih bermanfaat dibandingkan dengan program kesejahteraan sosial yang lainnya (Unayah, 2016). Yang masih jarang dilakukan ialah penelitian tentang keberlanjutan program pascakeikutsertaan seseorang dalam Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH. Padahal, evaluasi terkait keberlanjutan program urgen dilakukan.

Menurut Fiszbein & Schady (2009) bantuan tunai bersyarat/CCT yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan saat ini. Penerima bantuan mensyaratkan perilaku tertentu, seperti kehadiran anak di sekolah secara rutin/teratur atau memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar. Benerje dan Duflo (2012) menyatakan banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa rumah tangga memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai tindakan yang semestinya diambil. Untuk itu, dibutuhkan program sosial yang mendorong masyarakat melakukan tindakan yang tepat akan mendorong perbaikan kesejahteraan. Dalam kerangka demikian, berbagai praktik baik (*best practices*) dari pelaksanaan program PKH di lapangan perlu diangkat dan didiskusikan. Tujuan utamanya ialah agar Kelompok Penerima Manfaat (KPM), pendamping, dan pengambil kebijakan dapat mengambil nilai dan mempelajari proses yang pernah dipraktikkan di sebuah daerah.

Fakta empirik di beberapa daerah menunjukkan PKH mempunyai peran dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Hal itu tidak lepas dari cara, mekanisme, proses, dan strategi penerima manfaat dan pendamping dalam mengorganisasikan sumber dana yang berasal dari PKH. *Social enterprise* berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi-sosial di wilayah pedesaan, antara lain; menyediakan layanan dasar (kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan) bagi warga desa miskin, mendayagunakan sumber daya lokal desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai aktor, mendorong terciptanya pemerintahan inklusif dan memberdayakan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan strategis, menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga yang kurang mampu, dan meningkatkan modal sosial di tingkat lokal (Borgaza dkk., 2008). Kenyataan seperti itu terjadi di daerah termasuk di Kelurahan Nonbes dan Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang.

Pada tataran lain, peningkatan ketahanan ekonomi perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Ketahanan ekonomi keluarga adalah kapasitas yang dimiliki keluarga agar dapat keluar dari berbagai masalah ekonomi (Briguglio, 2006). Artinya, kapasitas ekonomi keluarga berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam mengatasi masalah ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan (*Center of Local Economis Strategis*, 2016). Dari konteks itu, persoalan ekonomi menjadi poin penting yang harus diperbaiki demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama keluarga. Kondisi inilah yang sedang dilakukan oleh penerima dana PKH exit-program PKH di Oesena dan Nonbes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang.

Menurut data di Kecamatan Amarasi, di dua desa itu terdapat 240 kelompok penerima manfaat PKH (Laporan PKH Kecamatan Amarasi, 2019). Di dua desa itu, dana PKH memang dimanfaatkan untuk tujuan utama. Selain memenuhi kebutuhan utama secara konsumtif, penerima manfaat di Kelurahan Nonbes dan Oesena memiliki inovasi dan kreatif dalam memanfaatkan dana PKH. Penerima manfaat secara cerdas memiliki langkah antisipatif dalam penggunaan dana PKH. Data menunjukkan beberapa orang penerima manfaat membagi dana PKH untuk pendidikan dan usaha ekonomi mikro. Beberapa di antaranya ialah usaha produksi minyak kelapa, usaha pembuatan makanan ringan, membuka lapak penjualan sayur, menjual sayur keliling, dan pembukaan kios.

Beberapa orang penerima manfaat secara antisipatif menyisihkan sebagian dana PKH untuk dua kelompok usaha tersebut. Dalam sebuah keterangan, pendamping PKH dua desa tersebut mengatakan hal tersebut memang menjadi misi pelaksanaan program PKH. Disebutkan, dalam prosesnya, Program PKH merupakan bantuan yang tidak saja memiliki manfaat konsumtif, tetapi terutama untuk tujuan

produktif. Dalam proses itu, beban hidup masyarakat disikapi dengan usaha kreatif memanfaatkan dana yang berasal dari program PKH (Laporan Pendamping PKH Kecamatan Amarasi, 2019). Praktik baik seperti itu dijalankan oleh 10 kelompok penerima. Dari 10 kelompok tersebut, enam kelompok memanfaatkan sebagian dana PKH untuk membuka kios, satu usaha pembuatan minyak kelapa, dan satu kelompok membuat makanan ringan. Faktanya, setelah exit-program PKH, usaha penerima manfaat tetap bertahan sampai hari ini (Laporan Pendamping PKH Kecamatan Amarasi, 2019).

Penelitian tentang PKH telah dilakukan banyak peneliti dari berbagai sudut kajian. Semua penelitian bertujuan mengetahui efektivitas program, urgensi PKH, dan evaluasi pelaksanaan program PKH. Temuan banyak kajian tersebut disajikan dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Beberapa kajian yang diperiksa terkait dengan penelitian ini di antaranya, Irmayani dan Nainggolan (2015) tentang perilaku coping penerima PKH, Unayah (2016), Nainggolan (2016), Nainggolan dan Susantyo (2017), Muhtadin (2016) tentang evaluasi program PKH, Putri dan Tauran (2016), dan Prayitna, dkk (2018) tentang implikasi positif dan negatif PKH.

Irmayani dan Nainggolan (2015) menyebutkan coping program merupakan langkah antisipasi penerima bantuan jika suatu ketika mereka keluar dari program PKH. Dua jenis coping yang terjadi yakni *problem focused coping* dan *emotion focused coping*. Di sisi lain, bersamaan dengan berjalannya waktu dan didukung dengan pendampingan, penerima bantuan kembali mengembangkan *problem focused coping*. Artinya, kehidupan sosial ekonomi penerima bantuan PKH masih belum stabil. Dalam penelitian lain, Unayah (2016) menemukan bahwa program kesejahteraan sosial anak dan program PKH lebih bermanfaat dibandingkan dengan program kesejahteraan sosial yang lainnya. Seperti Unayah, temuan Nainggolan (2016) menunjukkan pemberdayaan melalui KUBE PKH di Nagari Muaro Gadang Air Haji-Kecamatan Linggo Sari Baganti-Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan cara integrasi pendekatan struktural (*top down*) dan inklusif (*bottom up*). Pendekatan ini mempunyai kecenderungan sekunder. Disebutkan, 4 dari 5 KUBE PKH memiliki kecenderungan berhasil dan hanya satu yang masih gagal.

Nainggolan dan Susantyo (2017) menemukan program penanggulangan kemiskinan melalui PKH perlu dirancang ulang. Praksisnya berfokus pada pengembangan hal-hal baru untuk mendorong pengembangan program secara mendasar. Dalam studi tentang evaluasi program PKH, Muhtadin (2016) menyimpulkan pengawasan pelaksanaan program PKH dirasa belum maksimal. Orang tua tidak mengontrol anak-anak yang pergi ke sekolah. Dalam temuan lain, Putri dan Tauran (2016) dan Prayitna tentang menyebutkan evaluasi PKH di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah berjalan lancar meskipun beberapa anggota masyarakat masih tergantung pada bantuan. Diupayakan pembinaan terus-menerus pasca anggota PKH keluar dari program. Prayitna, dkk (2018) menyatakan bahwa PKH mampu menambah daya dukung sosial ekonomi anggota. Yang masih terus dilakukan ialah usaha di bidang pendidikan dan kesehatan. Sebab, ada fakta, dua aspek ini masih sering diabaikan. Padahal pendidikan dan kesehatan merupakan aspek penting dalam peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan penjelasan di atas, kajian ini berupaya mengkaji praktik baik Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Program PKH setelah exit-program dalam meningkatkan kesejahteraan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi usaha yang dikembangkan penerima bantuan PKH pasca-exit program PKH dan menganalisis strategi penerima dana PKH pasca-exit program untuk meningkatkan kesejahteraan.

1.1. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan telah ada sejak tahun 2007 (Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2019). Program ini bertujuan untuk akselerasi penanggulangan kemiskinan. Banyak temuan menunjukkan Program Perlindungan Sosial (*Conditional Cash Transfers-CCT*) ini berhasil dalam mengurangi kemiskinan terutama kemiskinan yang telah mengakar di beberapa negara.

Disebutkan, tujuan awal dari PKH adalah memutus mata rantai kemiskinan, dengan titik sentuh pada bagaimana keluarga penerima manfaat mengakses sarana Pendidikan dan sarana pelayanan

Kesehatan. Dalam hal ini bukan pada aspek layanan Pendidikan dan layanan Kesehatan itu sendiri, tetapi lebih bertitik tekan pada “bagaimana keluarga miskin penerima PKH menjangkau sarana Pendidikan dan sarana Kesehatan”. Kemudian bahwa setelah dalam keluarga penerima manfaat tidak lagi memiliki ibu hamil, anak balita, anak SD dan SMP atau sederajat, maka Keluarga Penerima Manfaat dimaksud, tidak lagi menjadi penerima manfaat. Inilah yang disebut *exit strategy*, yang kemudian ex-penerima manfaat ini disentuh melalui program KUBE demi meningkatkan kesejahteraannya, dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan tersebut.

Menurut Purwanto, dkk (2013), secara konseptual PKH dikembangkan dari model perlindungan sosial. Perlindungan sosial merupakan usaha negara untuk memberikan kepastian hidup bagi warga yang rentan seperti kaum miskin, perempuan, dan anak-anak. Program ini memiliki tujuan untuk membantu peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan melalui pemberdayaan anggota. Dalam beberapa tahun terakhir, PKH membantu usaha kecil anggota agar dapat bersaing dengan kelompok usaha bersama lainnya. Hasil penelitian Kemensos RI (2019) menjelaskan bahwa PKH berkontribusi bagi peningkatan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8% (Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (2019).

Berdasarkan penjelasan teoritik di atas, program bantuan PKH merupakan bentuk kebijakan sosial dalam sebuah rezim kesejahteraan. Program PKH menjadi alat perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Laoh, Sendow, dan Tarore (2016), indikator keberhasilan program ini mengacu pada konsepsi pengukuran variabel keberhasilan seperti ketepatan sasaran, komitmen peserta, dan manfaat bantuan.

Menurut Suharto dan Djuni (2012), program PKH dapat mengentas memutus mata rantai kemiskinan melalui: 1) Meningkatkan standar kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan pendapatan anak di masa depan (*price effect* anak keluarga miskin); 2) Mendorong harapan anak di masa depan (*insurance effect*); 3) Mengubah pola pikir dan perilaku keluarga miskin dalam bidang pendidikan dan kesehatan anaknya 4) Minimalisasi pekerja anak maupun anak jalanan; 5) Akselerasi dan percepatan pencapaian MDGs dengan upaya peningkatan akses di bidang pendidikan, kesehatan ibu hamil, minimalisasi kematian balita, dan peningkatan kesetaraan gender); 6) jangka pendek memberikan income effect kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin yang besar untuk biaya pendidikan dan kesehatan.

1.2. Kesejahteraan Sosial

Merujuk pada pendapat banyak ahli, Suharto (2006) mengatakan bahwa pengertian kesejahteraan mengandung empat makna, yakni “(1) Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya menunjuk pada Istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Midgley, et al (dalam Suharto, 2006) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah “*a condition or state of human well-being.*” Kesejahteraan adalah kondisi aman dan bahagia karena terpenuhinya kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan; serta kondisi di mana manusia mendapatkan perlindungan dari berbagai macam risiko atas kehidupannya. (2) Sebagai pelayanan sosial. Merujuk Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*). (3) Sebagai tunjangan sosial yang, khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada kelompok miskin dan rentan. (4) Merupakan proses terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian ke dua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga)”.

Bessant, Watts, Dalton dan Smith (dalam Sayrani dan Jehamat, 2019) membuat peta konseptual pembangunan kesejahteraan sosial menjadi empat yakni model universal, institusional, residual, dan model minimal. Pada bagian lain, terdapat dua jenis pendekatan yang dipakai dalam pembangunan kesejahteraan sosial yakni pendekatan residual dan developmental. Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) memiliki tujuan utama yakni peningkatan standar hidup manusia secara utuh. Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) mempunyai ciri khusus yakni komprehensif atau terpadu.

Aspek manusia, penerima manfaat, merupakan hal utama dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial. Berbagai usaha tersebut menempatkan manusia sejalan dengan lingkungan sosio-kulturalnya (Suharto, 2006).

Cara pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dimaksudkan di sini ialah bahwa dengan pendekatan ini, kebutuhan masyarakat dari subyek kesejahteraan perlu dipenuhi oleh lembaga yang memang difungsikan untuk itu. Dalam pendekatan ini, terminologi stigma menjadi sesuatu yang tidak perlu diangkat. Usaha preventif atau pencegahan menjadi langkah utama dalam setiap penanganan masalah kesejahteraan sosial. Karena itu, pelayanan sosial ditujukan untuk memelihara standar hidup yang laik dan baik (Sayrani dan Jehamat, 2019).

Program penanggulangan kemiskinan seringkali tidak tepat sasaran karena, dari beberapa kasus, dijumpai beberapa kalangan masyarakat miskin justru tidak bisa mengakses program tersebut. Dalam banyak temuan, program penanggulangan kemiskinan harus memiliki kejelasan sasaran. Harapan di masa yang akan datang, ada satu data terpadu tentang kemiskinan yang menjadi rujukan semua sektor dan Kementerian/Lembaga, lengkap *by name by address*, yang teruji validitas maupun reliabilitasnya. Secara singkat, kebijakan sosial yang *Strengths-Based* berarti menjamin berbagai dimensinya terkandung di dalamnya. Dimensidimensi tersebut antara lain konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipatif, efektivitas dan efisiensi (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

2. Metode

Semua penelitian ilmiah tentunya memiliki metode atau langkah-langkah yang harus ditempuh demi mendapatkan data penelitian yang valid. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data hasil penelitian baik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi secara induktif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Nonbes dan Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada observasi awal bahwa di sana terdapat kelompok penerima manfaat PKH yang melakukan kegiatan produktif selain melakukan kewajiban lain terkait PKH.

Subyek penelitian ini adalah pendamping PKH, tokoh masyarakat, masyarakat penerima bantuan/manfaat di dua desa tersebut. Pemilihan subyek penelitian tersebut disebabkan karena mereka dianggap mampu memberikan informasi terkait dengan akselerasi bantuan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Di samping itu, pemilihan pendamping PKH disebabkan karena keberhasilan masyarakat penerima bantuan dapat disebabkan karena sosialisasi intens yang dilakukan selama ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder (Miles, M. B. & Huberman, 1994). Pengumpulan data dilakukan dengan : 1) Observasi yaitu Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk proses penerimaan bantuan, bentuk kegiatan, dan praksis penghasilan tambahan yang didapat penerima bantuan PKH. 2) Wawancara mendalam yaitu penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam untuk mengetahui secara detail motivasi dan usaha masyarakat dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonominya. Informan yang diwawacarai dalam penelitian ini ialah penerima manfaat PKH, tokoh pemerintahan, dan tokoh masyarakat. 3) Data sekunder yaitu data sekunder merupakan data yang berkaitan dengan subyek penelitian sebagai data pendukung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui telaah pustaka tentang kesejahteraan, penelitian terkait PKH, literatur, serta dokumen yang membahas mengenai PKH.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah didapatkan baik berupa hasil wawancara dengan KPM, dokumentasi kegiatan KPM, maupun data dari pengamatan lapangan atau observasi (Miles, M. B. & Huberman, 1994).

3. Hasil

3.1. Gambaran Umum Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes

Desa Oesena merupakan salah satu desa di Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berpenduduk kurang lebih 1.400 jiwa dan memiliki garis keturunan atau marga yang sama. Luas Desa Oesena adalah 87,9 hektar are. Kondisi alam terdiri dari perbukitan dan dataran rendah. Luas Desa Oesena di Kecamatan Amarasi adalah 11,91 Km² dan kepadatan per Km 125,69. Sedangkan Kelurahan Nonbes merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berpenduduk kurang lebih 1.400 jiwa dan memiliki garis keturunan atau marga yang sama. Kelurahan Nonbes seluas 42,52 km² dengan kepadatan penduduk adalah 83,25.

Jumlah penduduk di Desa Oesena pada tahun 2018 adalah 380 Kepala Keluarga (KK) yang menyebar di tiga dusun dengan jumlah total penduduk sebanyak 1,446 orang. Sedangkan kelurahan Nonbes memiliki 380 kepala keluarga dengan jumlah total penduduk 3,540 orang (laki-laki 1,762 jiwa dan perempuan 1,778 jiwa).

Mata pencaharian penduduk Desa Oesena pada umumnya beragam seperti: PNS (17 orang), petani (425 orang), buruh (21 orang), pegawai swasta (21 orang), wiraswasta (11 orang), pensiunan (5 orang), dan lain-lain. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah penduduk yang bekerja di Kelurahan Nonbes sebanyak 401 jiwa dengan variasi pekerjaan terdiri dari petani (1430 orang), PNS (177 orang), TNI (4 orang), POLRI (3 orang), buruh (39 orang), wiraswasta (37 orang), pensiunan (40 orang), dan pegawai swasta (180 orang).

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk menunjang kesejahteraan di masa depan. Dengan pendidikan, manusia mampu bersaing dengan orang lain dalam meningkatkan status sosial. Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Desa Oesena sebanyak 2 unit, guru (ASN/swasta) berjumlah 20. Jumlah total siswa di Desa Oesena sebanyak 119 orang. Di Kelurahan Nonbes, terdapat 4 unit sekolah yang terdiri dari SD 1 unit, SMP 1 unit dan SMA 1 unit. Jumlah guru di Nonbes yakni 27 orang (guru SD), 42 orang (guru SMP), dan 9 orang (guru SMA). Jumlah siswa SD sebanyak 284 orang, siswa SMP sebanyak 413 orang, dan siswa SMA sebanyak 60 orang (Kecamatan Amarasi dalam Angka, 2019).

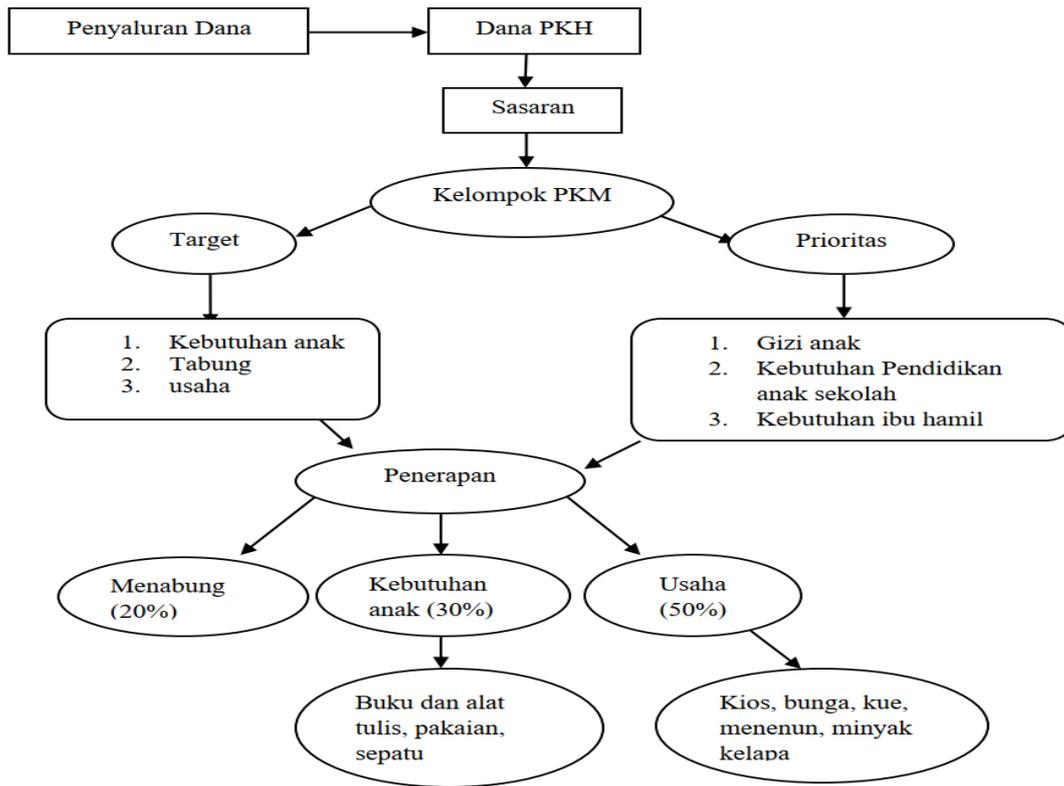
Data di atas menunjukkan bahwa ketidakmampuan membangun sarana/infrastruktur pendidikan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi sumber daya manusia yang rendah berimplikasi pada rendahnya tingkat kesejahteraan. Sebab, rendahnya SDM berdampak pada kesulitan mendapatkan pekerjaan dan lain-lain.

Jaminan kesehatan yang baik diharapkan dapat meningkatkan produktivitas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas, perbaikan akses, dan pemerataan layanan kesehatan kepada masyarakat. Keberadaan sarana dan fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan. Data menunjukkan, di Kelurahan Nonbes terdapat sebuah Puskesmas dan sebuah Puskesmas Pembantu di Desa Oesena.

Data di atas menunjukkan bahwa Keadaan kesehatan masyarakat di kecamatan Amarasi dapat dikatakan belum cukup baik karena belum adanya ketersediaan pelayanan kesehatan seperti belum adanya ketersediaan rumah sakit, seperti yang dapat dilihat di Desa Oesena yang dimana hanya adanya ketersediaan 1 puskesmas pembantu dan tidak didukung dengan poliklinik dan dokter praktek. Hal yang sama dapat dilihat di Kelurahan Nonbes dimana hanya menyediakan 1 puskesmas.

3.2. Rencana Berbasis Rumus 235

Selama menjadi anggota Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sering menggunakan rumus '235' dalam mengambil langkah taktis dalam menggunakan dana PKH.



Gambar 1. Rencana Berbasis Rumus 235

Berdasarkan keterangan informan, hampir semua KPM menggunakan rumus 235 pada saat menjadi anggota PKH. Perinciannya, 20% dari uang yang diterima saat menjadi anggota PKH ditabung, 30 dipakai untuk membeli kebutuhan anak, dan 50% untuk membuka usaha baru atau menambah modal pada usaha yang telah ada.

“kaka, kita sadar kita miskin. Makanya pemerintah bantu. Mah kalau kita salahgunakan ini uang kita yang repot kaka. Makanya kami ini putar otak. Uang biar sedikit tapi kalau bisa berguna. Di beberapa kelompok ini kami sering gunakan teori kalau bapa dong bilang. 235. 20 persen itu uang kami tabung. 30 persen itu dipakai untuk beli pakayan, sepatu buku anak dong. 50 persen ini kami gunakan untuk kalau bisa usaha kecil-kecil. Biar nanti kalau su tidak pkh lai, kita masih bisa sedikit bernafat. Benar kaka. Ada guna program begitu”.

Data di atas menunjukkan bahwa tampaknya masyarakat lebih cerdas dalam mengelola dana PKH. Sebab, pengelolaan dan pembagian dana PKH sebagian besar diprioritaskan untuk membuka dan mengembangkan usaha. Artinya, dana PKH yang diterima masyarakat tidak melulu untuk pemenuhan kebutuhan anak semata, melainkan lebih mementingkan kebutuhan jangka panjang yaitu membuka usaha. Potensi uang berkembang pun besar. Kebijakan sosial dalam memberikan Program Keluarga Harapan sepertinya sukses dikedua desa Oesena dan Nonbes. Hal ini terlihat dari kedua desa dalam mengelola dana yang berpengaruh sangat signifikan dalam meningkat kesejahteraan, terutama pada bidang pendidikan, rata-rata anak-anak KPM PKH kebutuhan pendidikan terpenuhi dari dana bantuan PKH serta modal usahan. Polemik PKH memang masih rentan di tengah masyarakat bahkan berbagai macam asumsi terkait penerimaan dan pengguna dana PKH yang tidak efektif. Tetapi, masyarakat mampu membungkam asumsi dengan mengelola dana PKH menjadi berkembang. Terlepas dari usahanya berjalan atau macet, pemikiran masyarakat bahkan jauh lebih maju dalam mengelolah dana PKH yang terbatas. Bukti efektifnya dana PKH yang dikelola masyarakat terlihat dari kegiatan menabung 20 persen dan 50 persen dana PKH untuk membuka usaha ketika kelak tidak lagi menjadi anggota KPM PKH.

“sekarang kami bisa membuka usaha karena menyisihkan sebagian dana pkh itu hari ditabung. Itu hari, kalau dijalan anak dong minta beli sesuatu, kami bisa ambil dari tabungan atau dari usaha. Tapi sekarang, kami sudah bisa mandiri kaka. Bukan apa. Kami bahkan bisa membeli barang-barang lain. Dulu kami ditertawai karena teman bilang untuk apa tabung atau buka usaha bunga. Sekarang mereka diam. Kalau oto dong sering datang ambil bunga di rumah”.

3.3. Usaha yang Dikembangkan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Pasca-exit Program PKH.

Menurut Hughes dan Kapoor (dalam Alma, 2003), usaha ialah *'business is the organized efforts of individuals to produce and sell a profit, the goods and services that satisfy society's needs'*. Usaha adalah upaya individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi dalam menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Usaha dalam konteks ini adalah kegiatan yang dikembangkan oleh Kelompok Penerima Manfaat (KPM) pasca-exit Program PKH. Usaha tersebut adalah respon yang efektif dari penerima PKH yang menjadikan dana tersebut sebagai stimulus untuk menghasilkan kreativitas dan produktivitas. Ada berbagai macam usaha yang dilakukan oleh penerima PKH sebagai berikut:

3.3.1. Kelompok Usaha Kios, Bunga, dan Pembuatan Kue

Kegiatan yang dilakukan KPM pasca-exit PKH di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes bervariasi. Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh KPM. Pembagian yang dilakukan dalam penelitian ini tidak didasarkan pada jenis usaha tetapi pada kelompok-kelompok yang dibentuk di lapangan. Yang paling umum ialah usaha kios, bunga, dan kue. Usaha-usaha tersebut dilakukan baik ketika anggota kelompok masih menjadi KPM PKH maupun sesudah (exit) tidak lagi menjadi bagian (anggota) program PKH. Pengakuan hampir semua informan menunjukkan bahwa sebagian besar penerima dana PKH menggunakan uang PKH tidak saja untuk kebutuhan seperti yang sudah ditetapkan peraturan seperti membeli kebutuhan pendidikan anak-anak tetapi sebagian lain ditabung dan dimanfaatkan untuk membuka usaha kecil-kecilan. Data menunjukkan KPM yang membuka kios sebanyak 6 anggota, yang membudidaya Bunga sebanyak tujuh belas anggota, dan yang membuka usaha kue sebanyak 2 anggota.

Masyarakat dengan cerdas memanfaatkan uang selama menjadi anggota KPM PKH untuk berbisnis kecil-kecilan seperti yang dikatakan oleh Ibu YL berikut ini:

“dulu saya menjadi anggota PKH. Uang tersebut digunakan untuk membantu anak sekolah. Uang pemerintah tersebut yang sekalipun tidak seutuhnya tetapi, setidaknya bisa dibantu oleh dana pemerintah tersebut. Kami harus jujur bahwa kami harus berterimakasih kepada dana pemerintah yang berharga dimata kami. Usaha kios ini, dulu pernah bangun tetapi darurat. Dan awal usaha kios 250.000 dan beta pakai itu uang untuk bagaimana caranya beta bisa usaha. Pertama usaha sayur, karena harganya bisa dijangkau, kita beli dengan 10.000 sampai 20.000, inikan kita bisa dapat. Selain itu, kita bisa dapat bunga 20.000 dan 15.000, nggurus dan tomat. Pas penarikan uang PKH dan kebutuhan anak-anak bisa terpenuhi maka selebihnya saya pakai uang tersebut untuk usaha. Dengan PKH kita bisa bangkit terus. Kalau kaka lihat, nonbes dan oesena sekarang penghasilan pokoknya adalah bunga. 1 minggu kita bisa dapat 100 sampai 150 ribu. Kalau usaha kios untuk satu hari minimal 20-25 ribu dan memang tergantung kalau pas rejeki kita bisa dapat 70-80 ribu per hari”.

Berdasarkan keterangan informan di atas disebutkan bahwa dengan dana yang jumlahnya sedikit, masyarakat memanfaatkan sebagaiannya untuk melakukan usaha. Usaha tersebut dijalankan dengan sungguh-sungguh. Faktanya, usaha itu mampu memenuhi sebagian kebutuhan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa para penerima PKH memiliki pola pemikiran yang progresif dalam memandang bentuk program pemerintah. Selain itu, pola pemikiran demikian merupakan langkah kreatif dan produktif mengatur modal yang jumlahnya terbatas.

Hal yang sama pula yang diungkapkan oleh Ibu D. Ibu D menerangkan bahwa:

“kaka, saya berpikir bahwa kalau sisa PKH kita hambur-hambur terakhir nanti kosong maka, dengan adanya ide kita berpikir bahwa biar kecil tetap kita manfaatkan itu uang. Saya

punya kios terdapat di dalam kamar, tidak seperti kios yang lain. Dengan adanya dana dari kios tersebut maka, saya mulai beli polibek dan mulai tanam bunga. Saya sisihkan dana sisa dari PKH untuk kebutuhan kios. Per bulan saya bisa dapat 2-3 ratus. Kalau nanti saya sudah berhasil dalam usaha ini, saya siap berikan atau bagikan pada orang lain yang lebih membutuhkan. Kalau untuk saya, kios ini cukup membantu dalam arti bahwa sabun, gula, kopi tidak beli. Sejauh ini memang PKH cukup membantu. Anak-anak juga ikut membantu saya dalam menyiram bunga. Kami selalu kerja sama.

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu M. Berikut penjelasannya:

“kaka, di tahun itu ada dana diluar dana untuk anak sekolah yang disebut dana tahunan dengan jumlahnya 500.000 ditambah lagi dana untuk anak sekolah jadi, saya terima 1. 200 ribu. Jadi, kebutuhan anak-anak bisa terpenuhi. Sisa uang tersebut ada 900 sekian. Saya memanfaatkan sisanya itu untuk beli bunga. Saya mulai kerja sama dengan beberapa langganan dari Noelbaki. Dari hasil bunga tersebut sangatlah lumayan. Satu minggu bisa dapat 1 juta ke bawah. Paling rendah mungkin 500 ribu untuk uang bunga. Tidak pernah kosong dalam satu hari. Awalnya saya taman dan belum ada yang beli, dari usaha bunga yang sedikit tersebut kita bisa belih beras, dan kebutuhan yang lain. Selain bunga, ada juga usaha siri pinang, kue, sayur mulainya dari setelah setahun masuk anggota PKH”.

Penjelasan di atas menggambarkan urgensi kesadaran dan manajemen usaha. Kesadaran setiap anggota diperlukan terutama dalam memahami makna program bantuan pemerintah. Dengan kesadaran yang baik, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai dana bantuan pemerintah untuk pengembangan ekonomi kreatif. Berkaitan dengan usaha ekonomi kreatif, para penerima bantuan dana PKH telah melakukan beragam usaha seperti kios, bungan, dan usaha pembuatan kue.

3.3.2. Menenun

Menenun adalah salah satu usaha pokok masyarakat di Desa Oesena dan Nonbes. Usaha menenun telah ada sebelum munculnya program PKH. Meskipun demikian, perkembangannya tidak berjalan seperti sekarang. Modal dan keterampilan penenun merupakan kendala utama. Kehadiran program PKH memberikan motivasi para penenun di dua wilayah tersebut. Menurut informan, meskipun bukan tujuan utama, keberadaan program PKH turut serta membangkitkan semangat para penenun dalam menekuni bidang usaha tersebut. Berikut petikan wawancara dengan seorang informan, Ibu Mt.

“waktu itu, beta sendiri masuk anggota PKH sudah 2 tahun. Saya merasa, uang tersebut tidak seberapa, karena tujuan utamanya untuk kebutuhan anak-anak dan saya memanfaatkan uang sisa kebutuhan mereka untuk membuka usaha. Kebetulan saya memiliki talenta dalam menenun ikat atau tenun ikat. Selain usaha itu, saya juga mengikuti usaha dari kelompok PKH yang lain dalam membuat usaha bunga. Awalnya saya berfikir bahwa saya harus mencoba membuat usaha ini yang walaupun dengan kondisi jalan yang rusak membuat pembeli jarang kesini tatapi, teman-teman PKH juga bilang usaha saja dan saya percaya nanti ada orang yang lewat, secara tidak sengaja melihat usaha saya dan akan mereka beli. Saya memiliki anak orang 2 dan masih di bangku sekolah dasar jadi, uang yang saya terima tidak seberapa karena jumlah uang yang kita terima tergantung jumlah anak dan tingkatan kebutuhan anak sesuai umur dan pendidikan. Jadi, sisa dana PKH yang dimanfaatkan untuk kebutuhan anak sekolah kita pakai untuk usaha serta beta tabung....Tergantung permintaan kalau misalnya sarung perempuan dan selendang itu saya jual 1 juta rupiah dan kalau satu paket, tambah dengan sarung laki-laki dan selimutnya, saya jual minimal dua 2 juta rupiah, kalau seragam dan sarung saya jual 1 juta rupiah, selendang dan selempang bisa jual dari 200.000 sampai 300.000. uang yang ada itu awalnya dari PKH”.

Gambaran seperti disampaikan informan di atas menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki rencana yang matang dan cerdas sejak menjadi anggota KPM program PKH. Data mengkonfirmasi kecerdasan masyarakat dengan kemauan meningkatkan usaha berbasis dana yang berasal dari program PKH. Sebagai salah satu usaha rumah tangga, menenun kain sudah menjadi bagian dari

kehidupan sosial masyarakat Nonbes dan Oesena. Selama dan sesudah dari program PKH (exit-program PKH), beberapa anggota yang membangun usaha tenun. Ketiadaan benang diatasi dengan keberadaan dana PKH.

3.3.3. *Mengolah minyak kelapa*

Mengelolah minyak kelapa merupakan bagian dari usaha rumah tangga masyarakat Oesena dan Nonbes. Usaha-usaha tersebut menjadikan sebagai usaha sampingan masyarakat, tetapi dibalik usaha-usaha itu ternyata modalnya bersumber pada dana bantuan PKH. Masyarakat dengan cendrik mengalihkan uangnya untuk berbisnis kecil-kecilan. Salah satu orang informan MN menjelaskan berikut:

“Mama marselina menerangkan bahwa saya menikah tahun 1993 dan asal saya dari Oebelo. Ketika selesai menikah, saya datang di amarasi karena melihat kondisi kelapa banyak maka, saya omong dengan bapa tua bahwa ini kelapa banyak, apakah di sini ada yang masa minyak ko sonde? Waktu itu mungkin masa minyak yang dulu-dulu berhenti jadi, katong yang lanjutkan.....Saat menjadi anggota PKH kami sadar pemerintah punya perhatian untuk kami orang-orang yang di bawah standar. Jadi, dengan adanya PKH bisa membantu kami untuk pendidikan anak-anak. Jadi, kami bisa sedikit menabung dan usaha. Kalau untuk PKH, itu kebutuhan anak-anak. Waktu awal terima PKH, lumayan untuk membeli anak-anak punya pakaian, yang rusak bisa diganti. PKH kita utamakan untuk anak-anak sekolah, terutama setiap hari untuk ojek. Prioritas PKH hanya untuk anak sekolah. Dari usaha ini tentu untuk kita punya hidup dan selebihnya untuk kita bisa tabung suapaya, ada simpanan. Saya menabung uang tersebut, karena saya berfikir bahwa sewaktu-waktu uang PKH tidak ada jadi, kami sudah ada modal untuk melanjutkan usaha dan untuk pemenuhan kebutuhan. Awal usaha memang ada hambatan terutama, alat mesin parut”.

Mengelolah minyak kelapa adalah kegiatan yang tidak kalah menarik dan penting bagi peningkatan kualitas ekonomi Nonbes dan Oesena. Para penerima dana exit-program PKH menyadari hal tersebut. Buktinya, penerima dana PKH mampu memanfaatkan dana tersebut untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Pola pikir modern dan progresif membuka mata masyarakat akan peluang usaha yang menjamin kesejahteraan hidup. Kecerdasan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola dana yang dipergunakan untuk kebutuhan anak-anak menjadi rujukan urgen bagi para penerima PKH yang lain.

3.4. *Strategi Usaha Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan*

Setiap usaha yang dilakukan manusia tidak terlepas dari strategi. Strategi menjadi urgen dalam setiap bentuk dan model usaha untuk mencapai keberhasilan. Menurut Porter (dalam Rachmat, 2014), strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk menyatakan nilai yang unik. Ahli lain menegaskan bahwa strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas yang berdaya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan.

Berkaitan dengan kegiatan para penerima atau KPM program PKH, strategi adalah tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk memafaatkan dana PKH dalam mengembangkan usaha produktif. Semua strategi diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama KPM Program PKH. Di Kelurahan Nonbes dan Desa Oesena, ada berbagai macam strategi yang dilakukan KPM pasca-exit program PKH.

3.4.1. *Membuat Rencana Anggaran Individu: Pembagian Berdasarkan Waktu saat menjadi anggota KPM.*

Para anggota KPM Program PKH di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes hadir dengan rencananya masing-masing dalam mengelola bantuan dana PKH. Untuk mempraktikkan ‘Rumus 235’, masyarakat memiliki skema dalam mengelolah dana PKH. Hal ini terlihat dari corak pengelolaan dana yang tidak semuanya dihabiskan untuk tujuan konsumsi tetapi dipakai untuk menabung serta beberapa kegiatan produktif mengembangkan usaha-usaha rumah tangga, kecilm dan mikro. Menurut informan, PKH membangkitkan semangat dan kreativitas anggota KPM dalam membuka dan

mengembangkan usaha dan tidak hanya untuk kebutuhan pokok keluarga terutama anak sekolah, gizi anak, dan kebutuhan ibu hamil.

Tabel 1. Gambaran estimasi rerata pendapatan KPM berdasarkan jenis usaha dalam tiga tahun terakhir.

Jenis Usaha	Modal Awal	2018	2019	Agustus 2020
Menjual kue	1.344.000	1.649.700	1710800	1.955.000
Membuka/mengembangkan Kios	2.100.000	2.536.800	2.599.200	2.724.000
Usaha Minyak Kelapa	2.496.000	3.369.600	3.494.400	3.744.000
Menjual bunga	3.696.000	4.326.000	4.416.000	4.596.000
Menenun	4.500.000	5.287.500	5.400.000	5.625.000

Data di atas menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dari modal yang dialokasikan KPM PKH di Oesena dan Nonbes. Diketahui bahwa sampai Agustus 2020, KPM yang membuka usaha (kue, membuka atau mengembangkan kios, minyak kelapa, menjual bunga, dan menenun) mengalami peningkatan. Jika dihitung, pendapatan tiap tahun berada dikisaran 35-50%. Hal tersebut menunjukkan adanya kontribusi positif keberadaan PKH di dua wilayah tersebut. Dengan demikian, ada indikasi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di dua wilayah itu.

Data memperlihatkan para penerima dana PKH (KPM) di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes melakukan perencanaan pengelolaan dana PKH baik secara individu dan terutama secara berkelompok selama menjadi anggota PKH. Di setiap item perencanaan, alokasi dana untuk pendidikan dan ibu hamil tidak bisa diganggu gugat. Semua anggota wajib mengalokasikan dana pendidikan seperti tertera dalam aturan pelaksanaan program PKH. Kegiatan di luar dua item itu (pendidikan dan ibu hamil) baru dapat dialokasikan anggaran jika dua kebutuhan tersebut sudah dipenuhi. Dalam proses itu, anggota KPM di dua wilayah tersebut melakukan perhitungan matang dan serius terkait kebutuhan anak sekolah dan ibu hamil. Jika dua kebutuhan itu sudah dipenuhi, anggota boleh mengalokasikan dana PKH untuk tujuan produktif lain atau pun untuk menabung. Seorang informan menjelaskan sebagai berikut:

“ sebelum kami menerima bantuan PKH, kami biasanya diskusi sesama anggota KPM untuk memenuhi kebutuhan anak dan yang lainnya kita pakai untuk modal usaha kecil-kecil, sehingga nanti uang berkembang. Selain itu juga kami biasa memantau orang-orang disekitar mencari tahu usaha apa yang mereka bangun. Kami serind diskusi dengan sesama anggota kaka. Kami diskusi mulai dengan kebutuhan anak sekolah dong. Ibu hami juga. Itu kan tidak boleh ditawar-tawar. Pendamping sudah sampaikan itu berkali-kali. Dan aturan memang begitu. Hanya kan kita juga tahu kebutuhan anak-anak kita. Sonde (tidak) mungkin beli sjepatu tiap bulan to kaka. Atau baju tiap bulan. Paling buku tulis dengan bolpoin dong. Lainnya uangnya sisa kaka”

Informasi di atas memberikan gambaran penting terkait manajemen keuangan dan kelompok. Yang dilakukan ialah membuat perencanaan. Perencanaan itu pun dilakukan secara individu dan didiskusikan dalam kelompok. Kenyataan berdiskusi ini merupakan sebuah arena utama dalam membagi pengetahuan dan pengalaman. Mudah dimengerti, pemahaman masyarakat penerima bantuan dirasa sangat baik. Kapasitas individu dan kelompok akhirnya menjadi syarat mutlak bagi tercapainya sebuah program. Ketika kapasitas masyarakat baik besar kemungkinan dana yang alokasikan pemerintah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan anggota PKM di Kelurahan Nonbes dan Desa Oesena dalam mengelola dana bantuan berawal dari perencanaan saat menjadi anggota PKM program PKH.

3.4.2. *Merintis Usaha Kecil-Kecilan*

Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes dapat disebut kelompok yang sangat kreatif dan produktif. Pada saat menjadi anggota KPM, penerima manfaat sudah mulai perlahan-lahan mengembangkan usaha rumah tangga dan usaha kecil di rumah masing-masing. Sebagian sisa uang yang dipakai untuk keperluan sekolah atau ibu hamil digunakan untuk mengembangkan usaha dan ditabung. Sejak menjadi anggota KPM, masyarakat sudah mulai membuka beragam usaha seperti kios, budidaya bunga, minyak kelapa, dan menenun. Usaha yang dilakukan tidak selalu bermodal besa. Seorang informan menyampaikan demikian:

“kaka, berapa besar dana pkh? Kecil kaka. Hanya jujur, biar kecil begitu, kita tidak mungkin habiskan itu uang untuk keperluan anak sekolah atau ibu hamil. Kecil memang uangnya. Tapi kan kita coba simpan uang itu yang lain. Ju kalau tidak kita coba usaha apa begitu. Dan itu karena kita pikir pkh ini kan tidak mungkin selamanya kaka. Kita kerja serius betul di sini. Saat diskusi kelompok ini kita coba cari jalan. Bagaimana uang yang sisa ini kalau kita gunakan untuk membuka usaha. Diam-diam awalnya kaka. Takut di Tanya pendamping pkh. Tapi hasilnya anak kami selesai sekolahnya. Kebutuhan mereka dipenuhi semua..”

Informasi di atas menggambarkan bahwa dana PKH sudah digunakan untuk keperluan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yakni untuk membantu kebutuhan anak sekolah dan ibu hamil. Meskipun demikian, uang yang diperoleh dari bantuan PKH tersebut ternyata tidak dihabiskan untuk tujuan konsumtif. Masih ada sisa uang dari kebutuhan utama tersebut. Sisa dana itu dimanfaatkan oleh anggota di Kelurahan Nonbes dan Desa Oesena untuk menabung dan membuka usaha. Selain karena kebutuhan anak-anak sudah terpenuhi, masyarakat memikirkan kehidupan setelah tidak lagi menjadi anggota PKH di kemudian hari. Atas dasar itu, pengembangan usaha produktif berbasis rumah tangga mulai dilakukan pada saat masih menjadi anggota PKH.

3.4.3. *Memasarkan Produk Usaha melalui berbagai cara*

Diskusi kelompok sebelum proses penerimaan dana PKH ternyata sampai pada cara memasarkan produk usaha rumah tangga anggota. Diketahui, semua anggota berkewajiban menjadi pemasar untuk produk yang dihasilkan kelompok. Seorang infroman menyampaikan sebagai berikut:

“kaka, tadi sudah kami ceritakan kalau pkh ini kan tidak terus-terus. Nah, kita bangun usaha. Atau mari kita pakai uang sisa untuk menopang usaha yang sudah ada. Trus ada teman yang bilang. Kita kalau tidak pasarkan ini barang tidak ada guna. Sementara di kelompok di desa Oesena dan Nonbes ini kan kami banyak usaha bunga, minyak kelapa, atau kain kaka. Ini mau bagaimana kalau kita diam. Untung ada yang beritahu teman atau keluraga. Ada anggota yang rumahnya dipinggir jalan rela untuk simpan jerigen minyak atau pajang kain anggota. Lumayan kaka. Dapat dari pemasaran begitu kami di sini”.

Informasi di atas memberikan gambaran bahwa usaha dan kerja keras anggota KPM tidak saja dalam menyusun rencana bersama tetapi juga dalam memasarkan produk hasil usaha rumah tangga. Diketahui, semua anggota memiliki tanggung jawab untuk memasarkan semua produk usaha rumah tangga melalui berbagai macam cara dan jaringan. Data ini menggambarkan, kekuatan dan soliditas kelompok merupakan sebuah keniscayaan dalam proses pengembangan masyarakat.

4. **Pembahasan**

Kesejahteraan menjadi tujuan utama program PKH. Meskipun demikian, untuk mencapai kesejahteraan, masyarakat tidak hanya mengandalkan dana bantuan dan tugas pemerintah semata. Ketelibatan, partisipasi, dan usaha kreatif masyarakat membantu dan menolong dirinya sendiri menyebabkan masyarakat mampu bertahan hidup. Fakta seperti itu dilihat pada masyarakat di dua wilayah tersebut. Masyarakat membuktikan bahwa pemerintah hanya sebagai fasilitator kesejahteraan. Aktor utama kesejahteraan adalah KPM sendiri.

Di level itu, masyarakat Nonbes dan Oesena memiliki kemampuan luar biasa. Karakter antisipatif, kreatif, dan maju baik dari cara berpikir maupun dari kinerja sosial nampak jelas di sana. Anggota

penerima PKH di kedua wilayah tersebut telah melakukan persiapan matang terkait masa depan. Masyarakat di dua desa itu memiliki usaha ekonomi kreatif yang menjadi acuan atau landasan untuk hidup mandiri. Masyarakat memiliki kreatifitas yang mumpuni sehingga mampu menggunakan dana PKH secara tepat. Kecerdasan merupakan kunci utama di sana. Pengalaman bergaul dengan dunia luar dipakai masyarakat untuk mengembangkan diri. Faktanya, keterbatasan dana tidak menghambat masyarakat mengembangkan usaha ekonomi kreatif.

Di sisi lain, pola pikir masyarakat justru melampaui harapan dan tujuan banyak pihak dalam penggunaan dana bantuan. Kesadaran akan kecilnya dana melekat dalam pikiran seluruh anggota KPM di kedua desa. Masyarakat menyadari bahwa PKH tidak ada selamanya. Menurut masyarakat, dana PKH merupakan alat untuk bergerak maju. Karena alat, bantuan PKH dapat menghidupkan perputaran uang dalam masyarakat. Dalam jangka pendek, masyarakat menggunakan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah. Dalam jangka panjang, masyarakat mengelolah uang untuk membuka usaha atau menambah modal usaha.

Di sana terlihat bahwa masyarakat KPM di dua lokasi tersebut memiliki kebiasaan baik dengan mengelolah dan mengatur uang yang terbatas seefektif mungkin. Masyarakat KPM di dua lokasi tersebut memberikan bukti bahwa pertemuan dengan dunia luar, menambah pengetahuan, dan mempelajari manajemen keuangan dapat diubah menjadi kekuatan untuk mengembangkan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, keberhasilan KPM di dua wilayah tersebut disebabkan karena masyarakat memiliki ide, cara berpikir, serta kemauan untuk berkembang. Di sisi lain, realitas penguatan kelompok merupakan hal lain yang harus disebutkan. Sebab, pembangunan kapasitas dan kekuatan dalam kelompok selama menjadi anggota KPM PKH ternyata berdampak pada tumbuhnya kesadaran individu dan bersama masyarakat untuk mengembangkan diri dan kekuatan sosial yang lebih besar.

Data menunjukkan bahwa dana PKH yang diterima dimanfaatkan selain untuk membiayai pendidikan dan dipakai untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Strategi semacam ini merupakan langkah antisipatif. Diakui, PKH bukanlah program tetap. Program PKH tentu tidak berlangsung lama. Oleh karena itu, kebijakan dalam mengelolah keuangan merupakan syarat penting dalam memanfaatkan setiap bantuan pemerintah. Praktik semacam ini dapat menjadi acuan bagi penerima PKH yang lain untuk lebih kreatif dan produktif dalam memanfaatkan dana PKH.

Berbagai data di atas menggambarkan bahwa usaha kios, bunga, dan kue merupakan bukti nyata penggunaan kecerdasan masyarakat dalam mengelola dana PKH. Bantuan PKH menyadarkan masyarakat Oesena dan Nonbes untuk melakukan usaha. Oleh masyarakat, bantuan PKH tidak saja disambut dengan baik tetapi juga dibalas dengan sangat baik oleh masyarakat. Dana PKH dianggap malaikat oleh masyarakat Nonbes dan Oesena. Kebijakan pemerintah melalui bantuan dana PKH sesuai dengan kebutuhan masyarakat di dua lokasi tersebut. Melalui fasilitator, pemerintah berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pada titik ini, masyarakat Oesena dan Nonbes hadir dan terlibat aktif menjadi eksekutor demi tercapainya kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan, masyarakat Oesena dan Nonbes tidak hanya bergantung kepada pemerintah tetapi dengan alat yang disiapkan pemerintah, masyarakat mampu menjadi aktor utama mencapai kesejahteraan. Menariknya, dalam pelaksanaan di lapangan, KPM di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes saling berlomba memanfaatkan dana tidak saja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tetapi membuka usaha dan membuat inovasi pembangunan. Hampir semua informan menyebutkan bahwa kemampuan berpikir dan pembagian pengalaman baik dari berbagai tempat merupakan senjata utama dalam pembangunan. Kapasitas berpikir perlu dimiliki oleh masyarakat agar setiap bantuan pemerintah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Informan mengakui bahwa kemampuan dan kapasitas anggota KPM PKH belum benar-benar baik. Kemauan untuk maju dan berkembang serta mengubah diri dan masyarakat merupakan motivasi dasar yang sejatinya dimiliki masyarakat. Oleh karena itu, hampir semua informan menyebutkan bantuan dana PKH bagi KPM di Kecamatan Amarasi terutama di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes berjalan efektif. Uang bukan menjadi hal utama dari persoalan kemiskinan dan kesejahteraan. Yang

utama ialah mengubah cara berpikir masyarakat. Masyarakat Nonbes dan Oesena telah membuktikan bahwa cara berpikir adalah salah satu alat utama dalam mengubah kehidupan sosial.

Data menunjukkan, usaha yang dilakukan oleh penerima PKH tersebut bukan saja untuk menghasilkan uang tetapi merevitalisasikan budaya menenun. Usaha tersebut mampu menghasilkan uang yang cukup banyak karena kain hasil tenunan dijual dengan harga yang cukup tinggi. Para penerima program PKH mampu mengelola sebagian dana PKH, yang sesungguhnya diperuntukan bagi kebutuhan anak-anak, untuk membangun dan mendirikan usaha rumah tangga, kecil, dan mikro. Kegiatan tersebut mampu membuka mata dan pikiran penerima program PKH yang lain. Data menunjukkan perkembangannya usaha rumah tangga dan kecil di dua wilayah tersebut saat ini. Kreativitas dan kecerdasan masyarakat mantan KPM program PKH di Nonbes dan Oesena merupakan landasan penting bagi penerima program PKH yang lain saat ini. Langkah penerima dana PKH setelah exit program menunjukkan kemajuan cara berpikir masyarakat. Keterbatasan dana mampu dikelola dengan baik sehingga membangkitkan kekuatan baru di masyarakat. Dalam konteks ini, setelah exit program PKH, mantan anggota penerima dana PKH produktif dalam mengelola dana PKH dengan membangun usaha menenun. Implikasi, kesejahteraan sosial perlahan-lahan tumbuh di Oesena dan Nonbes.

Bagi masyarakat Nonbes dan Oesena, bantuan dana PKH tidak hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan anak-anak sekolah, tetapi juga dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Data menunjukkan, oleh sebagian orang, dana PKH dihabiskan hanya untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah. Bagi masyarakat Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes, dana PKH dikelola dan diambil sebagiannya untuk pengembangan modal usaha dan ditabung. Berkaitan dengan usaha mengolah minyak kelapa, penerima dana PKH pasca-exit program mengambil dana yang sudah ditabung selama menjadi anggota PKH. Sadar akan bantuan yang terbatas, masyarakat Desa Oesena dan Nonbes mengeolah dana bantuan untuk berbagai kebutuhan termasuk dipakai untuk mengolah minyak kelapa.

Adagium yang mengatakan bahwa bantuan pemerintah memanjakan masyarakat tidak berlaku di Nonbes dan Oesena. Di sana, kenyataannya justru lain. Bantuan pemerintah selalu dianggap sebagai insentif bagi pengembangan ekonomi keluarga dan masyarakat. Sampai saat ini, masyarakat memperlihatkan tanggung jawabnya sebagai penerima dana dari program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan pengelolaan dana PKH oleh penerima dana baik pada saat menjadi KPM ataupun sesudah exit-program berjalan sangat tepat dan produktif. Masyarakat menggunakan sebagian dana PKH untuk pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam konteks pemanfaatan dana PKH, anggota KPM menggunakan kekuatan kelompok untuk berdiskusi mengenai apa pun terkait dana dan penggunaan dana PKH. Implikasinya, dana PKH tidak dihabur-haburkan tetapi dimanfaatkan untuk kebutuhan lain yang lebih produktif. Di sisi lain, kapasitas kelompok benar-benar dikembangkan untuk terus membangun jaringan guna memasarkan produk hasil usaha rumah tangga. Tujuan akhirnya ialah kesejahteraan masyarakat benar-benar nampak karena masyarakat KPM tidak merasa kekurangan terutama di saat-saat sulit seperti sekarang ini.

5. Kesimpulan

Setelah exit-program PKH, anggota KPM Program PKH Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes masih mendapatkan manfaat karena keikutsertaannya dalam program PKH. Hal ini dibuktikan dengan semakin membaiknya kehidupan sosial ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan anggota pasca exit-program PKH. Praktik penggunaan dana PKH oleh anggota KPM dilakukan sangat baik selama menjadi anggota sebab dana sebagian disisihkan untuk ditabung dan digunakan untuk pengembangan ekonomi rumah tangga dan ekonomi mikroserta usaha produktif lainnya.

Kelompok KPM di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes memiliki jiwa inovatif, kreatif, dan produktif. Kekuatan utamanya ialah pembangunan kapasitas individu dan kelompok melalui diskusi yang berkelanjutan. KPM di wilayah itu menerapkan prinsip 235 (20 persen ditabung, 30 persen untuk

kebutuhan anak, dan 50 persen untuk modal usaha) dan mengembangkan usaha kios, bunga, kue, menenun, dan usaha minyak kelapa untuk mengembangkan dana PKH. Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes memiliki strategi dalam meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan membuat rencana anggaran individu, merintis usaha kecil-kecilan, memasarkan produk-produk dari modal dan PKH.

6. Saran

Masyarakat Nonbes dan Oesena selainya mempertahankan kreativitas dan produktivitas masyarakat sebagai sebuah kelompok terutama bagi anggota KPM yang masih menerima dana bantuan untuk mengelola dana seefektif dan cerdas mungkin untuk mencapai kesejahteraan. Dana PKH yang kecil bisa dikembangkan menjadi besar jika dikembangkan dengan baik. Kecerdasan setiap kelompok dalam mengelola keuangan yang bersumber dari dana PKH sejatinya ditingkatkan agar membuahkan hasil baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota tidak saja pada saat masih menjadi anggota tetapi juga setelah exit-program PKH. Membuat rencana anggaran individu dan kelompok, merintis usaha kecil-kecilan, memasarkan produk-produk dari usaha rumah tangga selainya terus dilakukan agar program PKH benar-benar mewujudkan kesejahteraan bagi penerimanya.

Ucapan terimakasih: Terima kasih kepada anggota kelompok PKH di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes, baik yang masih aktif maupun yang telah selesai menjadi anggota PKH atas semua pelajaran baik yang didapat selama riset ini dilakukan.

Daftar Pustaka

- Alma, B. (2003). *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*. Bandung: Alfabeta.
- Banerjee, A. V. and Duflo, E. (2012). *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. New York. Public Affairs.
- Biro Pusat Statistik. (2019). *Kecamatan Amarasi dalam Angka 2019*. Kupang. BPS Kabupaten Kupang
- Borgaza, C., Galera, G., & Nogales, R. (2008). *Social Enterprise: A New Model For Poverty Reduction And Employment Generation : An Examination Of The Concept And Practice In Europe And The Commonwealth of Independent States. Bratislava, Slovak Republic*. UNDP Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States.
- Briguglio, L. (2006). 'Conceptualizing and Measuring Economic Resilience'. *Journal of Economics Department University of Malta*. Malta.
- Center of Local Economic Strategis. (2016). *Developing Local Economic Resilience: The Role of Local Enterprise Partnership (LEPs)*. Manchester: CLES.
- Departemen Sosial RI, 2009. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Tahun 2015. (2015). *Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (2015). *Kajian Program Keluarga Harapan*. Jakarta. Kementerian Keuangan RI.
- Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. (2019). *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Fiszbein, A. and Schady, N.R. (2009). *Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty. World Bank Policy Research Report*. Washington, DC, United States: World Bank.
- Irmayani dan Nainggolan, T. (2015). Perilaku Coping Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menjelang Exit Program Di Jakarta Utara. *SOSIO KONSEPSIA* Vol. 4, No. 03, Mei - Agustus, Tahun 2015.
- Laoh, Stevianus, Sendow, M. M., dan Tarore, M. L.G. (2016). 'Evaluasi Proses Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado'. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, ISSN 1907- 4298 , Volume 12 Nomor 2A, Juli 2016 : 315 – 330.
- Laporan Pendamping PKH Kecamatan Amarasi (2019).

- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed). London: Sage Publication.
- Muhtadin. 2016. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Pendidikan Dan Kesehatan (Studi Kasus Desa Jatisawit Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu). *Orasi Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 7, No 2 (2016).
- Nainggolan, T dan Susantyo, B. 2017. Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pogram Keluarga Harapan Studi di Empat Daerah di Indonesia. *SOSIO KONSEPSIA* Vol. 7, No. 01, September - Desember, Tahun 2017.
- Nainggolan, T. 2016. Pemberdayaan Peserta Program Keluarga Harapan Melalui Kelompok Usaha Bersama Di Nagari Muaro Gadang Air Haji - Pesisir Selatan. *SOSIO KONSEPSIA* Vol. 5, No. 03, Mei - Agustus, Tahun 2016.
- Prayitna, R. G. I., Nurhaeni, I. D. A., dan Demartoto, A. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Keberdayaan Perempuan di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan. *Spirit Publik*. Volume 13, Nomor 1, April 2018. Halaman 67-78. P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875.
- Purwanto SA, Sumartono, M. M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Wacana*, Vol 16, no 2.
- Putri, N. N dan Tauran. (2016). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. *Jurnal Publika*. Vol 4, No 8 (2016). ISSN 2354-600X.
- Rachmat. (2014). *Manajemen Strategik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ramdhani, A. and Ramdhani, M. A. (2017) *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Publik*, 11 (1). pp. 1-12. ISSN 1412-7083.
- Sayrani, L. P. dan Jehamat, L. (2019). Mendorong Kebijakan Sosial Berbasis Democratic Governance: Pelajaran dari Kota Kupang. *SOSIO KONSEPSIA* Vol. 9 No. 01, September - Desember, Tahun 2019.
- Suharto, E. dan Djuni, T. (2012). Program Keluarga Harapan (PKH): Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa. *Aspirasi* Vol. 3No. 1, Juni 2012, hal 1-20.
- Suharto, E. (2006). Peta Dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?. Makalah disampaikan pada Seminar "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.
- Unayah, N. (2016). Manfaat Program Kesejahteraan Sosial Daerah Tertinggal Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *SOSIO KONSEPSIA* Vol. 5, No. 02, Januari - April, Tahun 2016.
- Usman, S. (2003). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).
Published under licence by Sosio Konsepsia.